

**DETERMINAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur, BEI 2006-2007)**

Haryanto

Widy Erwansyah

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

The purposes of this study were to analyze the extent of information disclosure of corporate social responsibility in annual report of manufacturing company listed in Indonesian Stock Exchange and to analyze the effect of management ownership, leverage, firm size, industry profile, profitability and size of the board of commissioners on the extent of information disclosure of corporate social responsibility in annual report. The number of companies taken as samples in the research cover about 36.

The statistic method used to test the hypotheses is multiple regression. The empirical result showed management ownership, leverage, firm size, industry profile, and profitability has no significant effect to information disclosure of corporate social responsibility thus that size of the board of commissioners variable had effect to information disclosure of corporate social responsibility in annual report. Management ownership, leverage, firm size, industry profile, profitability and size of the board of commissioners had effect to information disclosure of annual report simultaneously. The score of adjusted R-square was 0,215 or 21,5%, management ownership, leverage, firm size, industry profile, profitability and size of the board of commissioners affected only 21,5% to voluntary disclosure, and 78,5% affected by other factors.

Keywords: management ownership, leverage, firm size, industry profile, profitability, size of the board of commissioners, information disclosure of corporate social responsibility.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Isu pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kembali menjadi topik perhatian setelah muncul empat dasawarsa yang silam (Cochran, dan Wood, 1984). Hal ini dikarenakan semakin banyaknya tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi pada kepentingan pemegang saham (*stockholder*) melalui pencapaian laba saja, namun juga memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya (Freeman, 1984; Jones, 1995; Sulisty, 2008). Keberpihakan perusahaan pada

pemegang saham dapat mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya ekonomi secara tidak terkendali sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia (Chen dan Metcalf, 1980; Anggraini, 2006).

Eksplorasi tersebut mengakibatkan banyaknya aksi protes yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan -- terutama karyawan dan masyarakat -- kepada manajemen perusahaan. Pihak karyawan menuntut keadilan terhadap kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan yang diterapkan perusahaan. Di lain pihak, banyak masyarakat yang melakukan protes atas eksternalitas pencemaran lingkungan akibat limbah atau polusi yang dilepas ke lingkungan. Hal ini tentunya menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauhmana perusahaan telah melaksanakan aktivitas dan tanggung jawab sosialnya, sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Cornell dan Shapiro, 1987; Clarkson, 1995; Darwin, 2004; Anggraini, 2006).

Saat ini, perusahaan semakin dituntut untuk memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas sosialnya. Perkembangan akuntansi konvensional (*mainstream accounting*) sejauh ini telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai *social responsibility accounting* (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Anggraini, 2006). Tanggung jawab sosial diartikan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab pada tindakan yang mempengaruhi konsumen, masyarakat, dan lingkungan (Ivancevic, 1992). Kini dalam SRA, paradigma tersebut diperluas menjadi pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Bentuk

pertanggungjawaban tersebut adalah berupa pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahapatra (1984), Belkaoui dan Karpik (1989), Cowen *et al.*, (1987), Hackston dan Milne (1996), Cooke T.E (1992) Donovan dan Gibson (2000) yang menyebutkan adanya pengaruh antara *size*, status *listing*, dan jenis industri terhadap luas pengungkapan dalam laporan tahunan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *size*, status *listing* adalah variabel penjelas yang penting, dan perusahaan manufaktur secara signifikan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan nonmanufaktur. Di Indonesia, Utomo (2000) meneliti pengungkapan sosial pada industri *high-profile* dan *low-profile*. Hasil yang sama ditemukan pada tema produk dan konsumen. Akan tetapi hasil pengujian parsial yang dilakukan tidak signifikan pada tema kemasyarakatan dan tema ketenagakerjaan. Henny dan Murtanto (2001) meneliti pengungkapan sosial perusahaan *high-profile* dan *low-profile* dalam laporan tahunan 1999 pada 58 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasilnya konsisten dengan Utomo (2000) bahwa perusahaan *high-profile* mempunyai pengungkapan informasi sosial yang lebih tinggi dari perusahaan *low-profile*.

Penelitian Yuliani (2003) menguji tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap praktek pengungkapan sosial dan lingkungan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Devina dkk. (2004) menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan tipe industri saja yang mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan profitabilitas dan basis perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sembiring (2005) meneliti karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial, studi empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode 2002, menunjukkan bahwa hanya tiga karakteristik perusahaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: *size* perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profil perusahaan sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Anggraini (2006) melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. Hasil penelitiannya menunjukkan prosentase kepemilikan manajemen dan tipe industri mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial, sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi sosial.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pelaporan informasi sosial menunjukkan hasil yang saling bertentangan. Pertentangan hasil penelitian tersebut khususnya di Indonesia dapat terjadi karena beberapa alasan seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang

ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan manajemen (*management ownership*) struktur hutang (*leverage*), ukuran perusahaan (*firm size*), tipe industri (*industry profile*), profitabilitas (*profitability*) dan ukuran dewan komisaris (*size of the board of commissioners*) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial?

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Dalam pandangan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), pemangku kepentingan perusahaan tidak hanya kelompok pemegang saham saja, ada kelompok lain yang setara dengan pemegang saham, yaitu kelompok pelanggan, pemasok, karyawan, kreditor, politisi, pemerintah, dan masyarakat (Cornell dan Shapiro, 1987; Donaldson dan Preston, 1995). Manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan para pemangku kepentingan dan melaporkannya kepada pemangku kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa para pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui semua informasi, baik informasi yang *mandatory* maupun *voluntary*, informasi keuangan maupun non-keuangan (sosial), mengenai bagaimana kegiatan perusahaan berdampak kepada pemangku kepentingan. Dampak dari aktivitas perusahaan kepada pemangku

kepentingan dapat diketahui melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa informasi keuangan dan nonkeuangan (Guthrie dan Parker, 1990).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR) merupakan kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan para pemangku kepentingan lainnya yang mencakup kepentingan pemilik modal, kelangsungan hidup perusahaan, pelanggan, karyawan, rekanan, pemerintah, masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup (Sulistyo, 2008). Selain itu, *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Wikipedia (2008) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun komunitas luas, yang disertai dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya serta seluruh keluarganya. Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) dalam dekade terakhir ini dan implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat (Untung, 2008).

Penerapan CSR dalam perusahaan selain diharapkan memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (*shareholders*), diharapkan juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan. Hal ini disebabkan karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang (Rosmasita, 2007). Manfaat CSR yang diharapkan bagi perusahaan antara lain: (1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan; (2) mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial; (3)

mereduksi risiko bisnis perusahaan; (4) melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan; (5) membuka pasar yang lebih luas; (6) mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah; (7) memperbaiki hubungan dengan perusahaan dan regulator; (8) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; (9) peluang mendapatkan penghargaan (Graves dan Waddock, 1994; Gray *et al.*, 1995; Untung, 2008).

Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok, khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut tentunya memperluas tanggung jawab perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan, di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa selama ini perusahaan memberikan kontribusi eksternalitas negatif terhadap lingkungan sekitarnya dan masyarakat seperti masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menjadi berkurang.

Menurut Gray, *et al.*, (1995), terdapat dua pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Pertama*, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat sebagai pemakai utama pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan dan cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan.

Pendekatan alternatif kedua yaitu dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan perusahaan. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hubungan Kepemilikan Manajemen dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam hal ini, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya, semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, *et al.*, 1995).

H₁: Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hubungan *Leverage* dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur (Meek *et al.*, 1995). Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah.

Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, kemungkinan perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan (Belkaoui dan Krapik, 1989; Scott, 2007). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat *leverage* tertentu, modal kerja dan ekuitas pemegang saham (Scott, 1997; Anggraini, 2006) . Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi (Belkaoui dan Krapik, 1989; Anggraini, 2006). Agar laba yang dilaporkan dapat terlihat tinggi di dalam laporan keuangan, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

H₂: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial

Ukuran perusahaan (*firm size*) mengkategorikan perusahaan ke dalam dua jenis, yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Suropto (1999) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga memungkinkan dan membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Penjelasan lainnya adalah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga memerlukan biaya yang relatif besar untuk pengungkapan selengkap seperti perusahaan besar. Hal ini dikarenakan pada umumnya perusahaan kecil berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan (Buzby, 1975 dalam Marwata, 2001). Ukuran perusahaan dalam

penelitian ini diproksikan dengan nilai kapitalisasi pasar (*market capitalization*). Alasannya adalah nilai kapitalisasi pasar mampu menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hubungan Tipe Industri dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial

Hackston dan Milne (1996), mendefinisikan *high profile companies* sebagai perusahaan yang memiliki *consumer visibility*, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi. Sedangkan, *low profile companies* didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki tingkat *consumer visibility* dan *political visibility* yang rendah.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan pemangku kepentingan yang dimiliki perusahaan antara lain konsumen, pesaing, dan pihak-pihak lain yang dapat melakukan tekanan politik, dapat menjadi faktor penentu utama terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Henriques dan Sodorsky, 1999). Selain itu, perusahaan-perusahaan *high profile* pada umumnya merupakan perusahaan yang sering memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya yang berpotensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas.

Perusahaan yang terklasifikasi dalam kelompok industri *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata. Sedangkan kelompok industri *low profile* terdiri dari bangunan, keuangan

dan perbankan, pemasok peralatan medis, properti, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga (Hackston dan Milne, 1996; Utomo, 2000).

H₄: Tipe industri berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hubungan Profitabilitas dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial

Profitabilitas merupakan faktor yang dapat membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Hackston dan Milne, 1996). Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas (Hackston dan Milne, 1996; Devina dkk., 2004).

Donovan dan Gibson (2000) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan.

H₅: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial

Dewan komisaris (*commissioner*) merupakan mekanisme pengendalian *intern* tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring, 2003). Fungsi dewan komisaris adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) serta bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan.

Ukuran dewan komisaris (*size of the board of commissioners*) yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005). Coller dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan *chief executive officer* (CEO) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Jika dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

H₆: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

METODA PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS) adalah data yang diungkapkan perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang meliputi tema lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum (Hackstone dan Milne, 1996). Pengukuran variabel ini dengan mengukur pengungkapan sosial laporan tahunan yang dilakukan dengan pengamatan mengenai

ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan keuangan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1.

2. Kepemilikan manajemen (MAN) merupakan prosentase saham yang dimiliki oleh manajemen. Variabel ini digunakan untuk mengetahui manfaat kepemilikan manajemen dalam mekanisme pengurangan *agency conflict* (Anggraini, 2006). Dalam penelitian ini kepemilikan manajemen diukur berdasarkan prosentase kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen.
3. *Leverage* (LEV) pengukuran variabel *leverage* diukur dengan menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas atau *debt equity ratio*.
4. Ukuran perusahaan (SIZE), diukur dengan menggunakan nilai kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan. Pengukuran kapitalisasi pasar diperoleh dengan mengalikan harga saham per 31 Desember dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa semakin besar nilai kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar tanggung jawab sosial yang diharapkan.
5. Tipe Industri (IND), dikelompokkan menjadi *high profile* dan *low profile* yang berdasarkan *consumer visibility*, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi masing-masing perusahaan. Penelitian ini mengukur profil perusahaan dengan variabel *dummy*, yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan *high profile* dan 0 untuk perusahaan *low profile*.
6. Profitabilitas (PM), indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah *net profit margin*.
7. Ukuran dewan komisaris (COM) dalam penelitian ini diukur dengan banyaknya anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Pengukuran variabel ukuran dewan

komisaris dalam penelitian ini dengan menggunakan data jumlah dewan komisaris yang terdapat pada ICMD.

Jenis Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2007. Pemilihan sampel hanya terbatas pada emiten yang sahamnya termasuk dalam kategori perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2007.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Metode ini melihat dan menyalin dari berbagai sumber. Data laporan keuangan diperoleh dari Pojok BEJ FE Undip, BEI, Danareksa Sekuritas, dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPS = a + b_1MAN_i + b_2LEV_i + b_3SIZE_i + b_4IND_i + b_5PM_i + b_6COM_i + e$$

Keterangan:

- IPS = Indeks Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial
- MAN_i = Prosentase Kepemilikan Manajemen
- LEV_i = Tingkat *Leverage* (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas / DER)
- SIZE_i = Ukuran Perusahaan (Kapitalisasi pasar)
- IND_i = Tipe Industri (*Dummy* untuk mengklasifikasikan industri *high profile* (1) dan *low profile* (0))
- PM_i = Profitabilitas (Laba bersih terhadap pendapatan (NPM))
- COM_i = Ukuran Dewan Komisaris (Jumlah Anggota Dewan Komisaris)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 dan 2007 berjumlah 293 perusahaan, yang terdiri atas 142 perusahaan untuk tahun 2006 dan 151 untuk tahun 2007. Deskripsi ringkas data penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

---- Insert Tabel 1 ----

Dalam penelitian ini sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel dipilih bagi perusahaan yang menyampaikan informasi pertanggungjawaban sosial dalam *annual report* atau laporan tahunan perusahaan dua tahun berturut-turut selama periode penelitian (tahun 2006-2007). Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak dalam Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 sebagai berikut.

---- Insert Tabel 2 ----

---- Insert Tabel 3 ----

---- Insert Tabel 4 ----

Hasil Pengujian Statistik

Model summary dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R^2 adalah 0,215. Hal ini berarti 21,5% variasi IPS dapat dijelaskan oleh variasi dari keenam variabel independen (MAN, LEV, LN_SIZE, IND, PM, COM). Sedangkan sisanya 78,5% (100%-21,5%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

---- Insert Tabel 5 ----

---- Insert Tabel 6 ----

Dari Uji F dalam Tabel 6, didapat nilai F hitung sebesar 4,236 dengan probabilitas signifikansi 0,001. Hal ini berarti bahwa semua variabel independen (MAN, LEV, LN_SIZE, IND, PM, COM) secara simultan berpengaruh terhadap IPS.

---- Insert Tabel 7 ----

Berdasarkan pengujian uji t dalam Tabel 7, probabilitas signifikansi untuk variabel MAN adalah 0,931; untuk variabel LEV adalah 0,259; dan untuk variabel LN_SIZE adalah 0,230; untuk variabel IND adalah 0,852; untuk variabel PM adalah 0,217; untuk variabel COM adalah 0,014. Oleh karena nilai probabilitas signifikansi MAN, LEV, LN_SIZE, IND, dan PM di atas nilai probabilitas signifikansi 0,05, ini berarti variabel MAN, LEV, LN_SIZE, IND, dan PM secara individual atau parsial tidak mempengaruhi variabel IPS. Sedangkan untuk variabel COM, nilai probabilitas signifikansinya di bawah nilai probabilitas signifikansi 0,05, ini berarti variabel COM secara individual mempengaruhi variabel IPS.

Hubungan Kepemilikan Manajemen (MAN) dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 7), dapat diketahui bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kusuma (2007) yang tidak berhasil membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan membantu penyatuan kepentingan antar manajer dan pemegang saham. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) kepemilikan manajemen dalam penelitian ini pada

umumnya mempunyai proporsi kepemilikan yang kecil, sehingga perasaan memiliki dalam diri manajemen tidaklah terlalu besar, yang pada akhirnya sikap manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan tidaklah begitu besar, sebaliknya tindakan untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya menjadi lebih besar, (2) ukuran sampel perusahaan dimungkinkan tidak dapat menjawab atau mempresentasikan populasi, sehingga hasil yang diperoleh menjadi bias. Pada umumnya sampel dalam penelitian ini memiliki proporsi kepemilikan manajemen yang kecil, (3) investor yang ada di lapangan, lebih mengandalkan alat analisis yang bersifat fundamental, sehingga luas pengungkapan laporan keuangan tidak berpengaruh (Hadi dan Sabeni, 2002).

Lebih jauh Morck *et al.*, (1988) menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kepemilikan manajemen, maka kemampuan manajer untuk memodifikasi proses menghasilkan laba (perataan laba) melalui pemilihan kebijakan akuntansi akan meningkat pula. Implikasinya, ketika perusahaan menghadapi *monitoring cost* dan *contracting cost* yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan dan ketika visibilitas politik rendah cenderung melaporkan laba menjadi lebih rendah. Artinya, ketika perusahaan menghadapi *monitoring cost* dan *contracting cost* yang rendah dan visibilitas politik yang tinggi cenderung akan mengungkapkan informasi sosial.

Hasil ini tidak konsisten dengan argumentasi yang dibangun dengan menggunakan teori keagenan, yaitu bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan image perusahaan. Tetapi hasil hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kusuma (2007) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh saham yang dimiliki manajemen terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

Hubungan Leverage (LEV) dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 7), dapat diketahui bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan teori agensi yang menyatakan bahwa tingkat leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari debtholders.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan argumentasi yang dibangun dengan menggunakan teori agensi, tetapi hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Suda dan Kokubu (1994), dan Anggraini (2006). Alasan penolakan hipotesis diduga disebabkan karena perusahaan secara tradisional mempunyai hubungan yang baik dengan kreditur, meskipun mempunyai suatu derajat ketergantungan yang tinggi pada hutang. Oleh karena itu, *leverage* kurang diperhatikan oleh pihak donatur atau pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan sehingga kurang memperhitungkan kualitas *leverage* perusahaan. Selain itu, alasan penolakan hipotesis ini diduga juga disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang informasi keuangan (tentang tingkat *leverage*) oleh pemakai laporan keuangan. Adanya keterbatasan pengetahuan ini mengakibatkan para pemakai laporan keuangan kurang dapat menafsirkan makna tingkat *leverage* tersebut (Kusuma, 2007).

Hubungan Ukuran Perusahaan (SIZE) dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS)

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial (IPS). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 7), dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan argumentasi yang dibangun dengan menggunakan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang akan muncul juga semakin besar. Karena dengan mengungkapkan informasi sosial perusahaan secara lebih luas dapat mengurangi biaya keagenan yang akan muncul pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan, Hackston dan Milne (1996), Hasibuan (2001), Sembiring (2003). Akan tetapi, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan. Alasan penolakan hipotesis diduga disebabkan karena dengan mengungkapkan informasi sosial lebih banyak secara lebih luas, pihak manajemen khawatir akan membahayakan posisi perusahaan terhadap kompetitor dan pemegang saham. Lebih lanjut, tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial disebabkan karena perekonomian di Indonesia yang belum stabil. Hal ini mengakibatkan perusahaan lebih cenderung memanfaatkan dana untuk kegiatan operasional yang bersifat profit oriented dengan harapan perusahaan tetap

bertahan dalam kondisi apapun daripada memanfaatkan dana untuk kegiatan sosial (Kusuma, 2007).

Hubungan Tipe Industri (IND) dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS)

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah tipe industri (IND) berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial (IPS). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 7), dapat diketahui bahwa tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini berarti hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utomo (2000) dan Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa tipe industri yang dibedakan menjadi *high profile* dan *low profile* mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Alasan penolakan hipotesis dapat dipahami karena tidak adanya kepastian suatu perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* melakukan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial lebih luas dibandingkan dengan perusahaan *low profile*. Hal ini bisa dikarenakan pelaksanaan *social responsibility investment* belum tinggi sehingga investor lebih cenderung memilih perusahaan yang lebih berkonsentrasi pada laba, harga saham, dan bagaimana cara perusahaan agar tetap *survive* melalui kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi produksi perusahaan.

Menurut teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) bahwa semakin kuat posisi para pemangku kepentingan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para pemangku kepentingan. Hal ini berarti,

posisi pemangku kepentingan di Indonesia masih lemah, sehingga tekanan terhadap perusahaan untuk melakukan aktivitas sosial lingkungan masih rendah. Termasuk dari pemerintah, yang pada tahun 2007 baru mengeluarkan peraturan pelaksanaan dan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial lingkungan.

Hubungan Profitabilitas (PM) dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 7), dapat diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini berarti hipotesis kelima (H5) ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan argumentasi teori legitimasi yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang bagus, perusahaan dalam hal ini manajemen menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang kesuksesan keuangan perusahaan, termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan.

Alasan penolakan hipotesis diduga disebabkan karena pengaruh kebijakan perusahaan mengenai aktivitas sosialnya. Penelitian ini menunjukkan kebijakan aktivitas sosial lingkungan perusahaan yang cenderung untuk tetap mempertahankan dan memanfaatkan laba yang diperoleh untuk aktivitas operasional yang lebih menguntungkan karena untuk melakukan aktivitas kepedulian sosial lingkungan, perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan hal ini akan mengurangi laba yang dihasilkan. Selain itu perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi belum tentu lebih banyak melakukan aktivitas sosial karena pemahaman perusahaan lebih berorientasi pada laba semata bukan pada pertanggungjawabannya terhadap lingkungan sosial.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris (COM) dengan Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial (IPS)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan (lihat Tabel 7), dapat diketahui bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini berarti hipotesis keenam (H6) diterima. Dengan demikian, terbukti bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori agensi dan konsisten hasil penelitian Coller dan Gregory (1999) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan *chief executive officer* (CEO) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga tekanan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan juga akan semakin besar. Hal ini juga bisa disebabkan karena kebutuhan *outside director* mengakses informasi mengenai kondisi perusahaan semakin tinggi, sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial secara lebih luas. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Zaleha (2005) dan Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Simpulan-simpulan yang dapat diinferensikan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial (IPS), sedangkan kepemilikan manajerial (MAN), leverage (LEV), ukuran perusahaan (SIZE), tipe industri (IND), dan

profitabilitas (PM) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial (IPS).

Rasionalisasi yang dapat diberikan untuk menjelaskan hasil temuan ini adalah: *Pertama*, dalam dua tahun pengamatan (2006 dan 2007), pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih belum dianggap penting baik oleh perusahaan maupun para pemakai laporan keuangan. *Kedua*, hanya ukuran dewan komisaris saja yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial. Hal ini menegaskan bahwa dewan komisaris dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif untuk mengendalikan *chief executive officer* (CEO) dan memonitor apa yang dilakukan CEO sehingga tekanan terhadap manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial juga akan semakin besar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat melemahkan validitas pengembangan penelitian maupun melemahkan validitas hasil penelitian ini. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 dan 2007; *Kedua*, penelitian ini tidak memberikan paparan yang luas tentang item-item pengungkapan sosial; *Ketiga*, subjektivitas dalam pengukuran pengungkapan sosial tidak dapat dihindari sehingga kemungkinan terjadi bias dalam pengukuran pengungkapan sosial.

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga dapat dibuat generalisasi teori secara valid. Kemudian periode penelitian sebaiknya lebih dari dua tahun karena periode yang lebih panjang diharapkan dapat lebih menjelaskan pengungkapan sosial, serta penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel

lain untuk menemukan suatu model standar pendugaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, W., Monsen, R. 1979. "On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self-reported Disclosure as a Measure of Corporate Social Involvement", *Academy of Management Journal*, Vol. 22 pp.501-15.
- Adams R., Carruthers, J., Hamil, S. (1991), *Changing Corporate Values*, Kogan Page, London
- Alexander, G., Bulcholz, R. 1978. "Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance", *Academy of Management Journal*, Vol. 21 pp.479-86.
- Anderson, J., Frankle, A. 1980. "Voluntary Social Reporting: an Iso-Beta Portfolio Analysis", *Accounting Review*, Vol. 55 pp.468-79.
- Angelidis, P., Ibrahim, N. 1993. "Social Demand and Corporate Supply: a Corporate Social Responsibility Model", *Review of Business*, Vol. 15 pp.7-10.
- Anggraini, R. R. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta)." *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Belkaoui, A. 1976, "The Impact of the Disclosure of the Environmental Effects of Organization Behaviour on the Market", *Financial Management*, Vol. 5 No.4, pp.6-31
- Belkaoui, A and P. G. Karpik, 1989. "Determinants of the Corporate Decision to Disclose Sosial Information", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 2 No. 1, p. 36- 51.
- Carroll, A.B. 1979. "A Three-Dimensional Model of Corporate Performance", *Academy of Management Review*, Vol. 4 No.4, pp.497-505.
- Chen, K., Metcalf, R. 1980. "The Relationship between Pollution Control Record and Financial Indicators Revisited", *Accounting Review*, Vol. 55 pp.168-77.
- Chugh, E. 1978. "Impact of Pollution Control Regulations on the Market Risk of Securities in the US", *Journal of Economic Studies*, Vol. 16 No.2.
- Clarkson, M.B.E. 1995. "A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Social Corporate Performance", *Academy of Management Review*, Vol. 20 No.1, pp.92-117.
- Cochran, P., and Wood, R. 1984. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance", *Academy of Management Journal*, Vol. 27 No.1, pp.42-56.
- Coller, P. and A. Gregory. 1999. "Audit Committee Activity and Agency Cost" *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 18 (4-5) pp 311-332.
- Cooke, T.E. 1992. "The Impact Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure the Annual Report of Japanese Listed Corporation". *Accounting and Business Research* 22, Summer.
- Cornell, B., and Shapiro, A. 1987. "Corporate Stakeholders and Corporate Finance", *Financial Management*, Vol. 16 pp.5-14.
- Cowen, S.S., Ferreri, L.B. and Parker, L.D. 1987. "The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology And Frequency-Based Analysis", *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 12 No. 2, pp. 111-22.

- Darwin, A, 2004. "Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia", *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*, Yogyakarta.
- Devina, F., L Suryanto, dan Zulaikha, 2004, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 4 Agustus, pp. 161-167.
- Donaldson, T. dan Preston, L. 1995. "The Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Concepts, Evidence and Implications". *Academy of Management Review*, Vol. 20, pp. 65-91.
- Donovan, G. and K. Gibson, (2000). "Environmental Disclosure in the Corporate Annual Report: A Longitudinal Australian Study". *Paper for Presentation in the 6th Interdisciplinary Environmental Association Conference*, Montreal, Canada.
- Epstein, E. 1987. "The Corporate Social Policy Process and the Process of Corporate Governance", *American Business Law Journal*, Vol. 25 pp.361-83
- Fitriany, 2001. "Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta", *Simposium Nasional Akuntansi IV*.
- Frankle, A., Anderson, J. 1978. "The Impact of the Disclosure of Environmental Effects of Organizational Behaviour on the Market: Comment", *Financial Management*, Vol. 21 pp.92-107.
- Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management : A Stakeholder Approach*, Pitman, Boston, MA.
- Ghozali, I. 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gray, R., R. Kouhy and S. Lavers. 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of Literature and Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No.1, pp. 47-77.
- Graves, S.B., Waddock, S.A. 1994. "Institutional Owners and Corporate Social Performance", *Academy of Management Journal*, Vol. 37 No.4, pp.1034-46.
- Guthrie, J. and Parker, L.D. 1990. "Corporate Social Disclosure Practice: A Comparative International Analysis", *Advances in Public Interest Accounting*, Vol. 3, pp. 159-175.
- Hackston, D and Milne, MJ. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 8, No.2, pp 105-108
- Hadi, N. dan A. Sabeni. 2002. "Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Maksi*, Vol. 1, Agustus 2002.
- Hasibuan, M. Rizal, 2001. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Tahunan Emiten di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya". *Tesis S2 Program Magister Undip* (Tidak Dipublikasikan)
- Henny dan Murtanto, 2001. "Analisis Pengungkapan Sosial Pada Laporan Tahunan" . *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 1, No.2
- Henriques and P. Sadosky. 1999, "The Relationship Between Environmental Commitment and Managerial Perceptions of Stakeholder Importance" *Academy of Management Journal*, Vol. 4: 87-99.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Corporate Social Responsibility](http://id.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility), diakses 6 September 2009.

- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2004. "Standar Akuntansi Keuangan Paragraf 9". Salemba Empat, Jakarta
- Institute for Economic and Financial Research. 2008. *Indonesian Capital Market Directory*. Jakarta
- Ivancevich, J.M. 1992. *Human Resource Management: Foundations of Personnel*. 5th Edition. Boston: Richard D. Irwin, Inc
- Januarti, I dan D. Apriyanti. 2005. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan". *Jurnal Maksi*, Vol. 5.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, pp. 82-137.
- Jones, T.M. 1995. "Instrumental Stakeholder Theory - a Synthesis of Ethics and Economics", *Academy of Management Review*, Vol. 20 No.2, pp.404-37
- Jones, T. M. 1999. "The Institutional Determinant of Social Responsibility", *Journal of Business Ethics*, Vol. 20, pp. 163-179.
- Kusuma, I. 2007. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial pada Perusahaan *Go Public* di Bursa Efek Jakarta". *Skripsi S1 FE Undip* (Tidak Dipublikasikan).
- Komar, Seful, 2004. "Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam", *Media Akuntansi*, Edisi 42/Tahun XI, hal. 54-58.
- Mahapatra, S. 1984. "Investor Reaction to Corporation Social Accounting", *Journal of Business and Finance and Accounting*, Vol. 11 pp.29-40
- Marwata, 2001. "Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dengan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi II*.
- Meek, G. K., C. B. Robert, S. J. Gary, 1995. "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK, and Continental European Multinational Corporations," *Journal of International Business Studies*, Third Quarter.
- McGuire, J., Sundgren, A., Schneeweis, T. 1988. "Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance", *Academy of Management Journal*, Vol. 31 No.4, pp.854-72.
- Mills, D., Gardner, M. 1984. "Financial Profiles and the Disclosure of Expenditure for Socially Responsible Purposes", *Journal of Business Research*, Vol. 14 No.4, pp.407-24
- Morck, R., A. Shleifer and R. W. Vishny, 1988. "Alternative Mechanisms for Corporate Control," *NBER Working Papers 2532*, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Moskowitz, M. 1975. "Profiles in Corporate Social Responsibility", *Business and Society*, Vol. 13 pp.29-42
- Parert, I.R., Eilbirt, H. 1975. "Social Responsibility: The Underlying Factors", *Business Horizons*, Vol. 18 No.4, pp.5-10.
- Pava, M.L., Krausz, J. 1996. "The Association between Corporate Social-Responsibility and Financial Performance - The Paradox of Social Sost", *Journal of Business Ethics*, Vol. 15 No.3, pp.321-57
- Roberts, R. 1992. "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure an Application of Stakeholder Theory", *Accounting Organizations and Society*, Vol. 17 No.6, pp. 595-612.

- Rosmasita, Hardhina. 2007. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta". *Skripsi S1 FE UII* (Tidak Dipublikasikan).
- Rosen, B.N., Sandler, D.M., Shani, D. 1991. "Social-Issues and Socially Responsible Investment Behavior - A Preliminary Empirical-Investigation", *Journal of Consumer Affairs*, Vol. 25 No.2, pp.221-34
- Scott, W. R. 1997. *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall, New Jersey.
- Sembiring, E.R. 2003. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial". *Tesis S2 Magister Akuntansi Undip* (Tidak Dipublikasikan)
- Sembiring, E.R. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". *Seminar Nasional Akuntansi VIII*.
- Shane, P., Spicer, B. 1983. "Market Response to Environmental Information Produced Outside the Firm", *Accounting Review*, Vol. 58 pp.521-38.
- Spicer, B. 1978a. "Investors, Corporate Social Performance and Information Disclosure: An Empirical Study", *Accounting Review*, Vol. 53 pp.94-111
- Spicer, B. 1978b. "Market Risk, Accounting Data and Companies' Pollution Control Records", *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 5 pp.67-83
- Suda, K., Kokubu, K. 1994. "Some Determinants of Environmental Disclosure in Japanese Companies". In Yamagami, T., Iida, S. (Eds), *Corporate Social Disclosure*, Hakuto-Shobo
- Sulistyo, H. 2008. Pelaporan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Jangka Panjang. *Ekobis*, Vol. 9, No.1, Januari 2008, pp. 31-37
- Suripto, B. 1999. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan". *Simposium Nasional Akuntansi II*.
- Trotman, K., Bradley, G. 1981. "Association between Social Responsibility Disclosure and Characteristics of Companies", *Accounting Organizations and Society*, Vol. 6 pp.355-62
- Tuzzolino, F., Armandi, B. 1981. "A Need - Hierarchy Framework for Assessing Corporate Social Responsibility", *Academy of Management Review*, Vol. 6 No.1, pp.21-8.
- Ullmann, A. 1985. "Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of US firms", *Academy of Management Review*, Vol. 10 No.3, pp.540-57
- Untung, H. B. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Utomo, M. 2000." Praktek Pengungkapan Sosial pada Pelaporan Tahunan Perusahaan di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Perusahaan-Perusahaan *High-Profile* dan *Low-Profile*)". *Simposium Nasional Akuntansi IV*.
- Vyakarnam, S. 1992. "Social Responsibility: What Leading Companies Do", *Long Range Planning*, Vol. 25 No.5, pp.59-67.
- Wartick, S., Cochran, P. 1985. "The Evolution of the Corporate Social Performance Model", *Academy of Management Review*, Vol. 10 No.4, pp.758-69
- Yuliani, Rahma. 2003. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan di Indonesia". *Tesis S2 Program Magister Undip* (Tidak Dipublikasikan).
- Wood, D. 1991. "Corporate Social Performance Revisited", *Academy of Management Review*, Vol. 16 No.4, pp.758-69

Zaleha, Siti. 2005. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 2003". *Skripsi SI FE Undip* (Tidak Dipublikasikan).

Lampiran

Tabel 1
Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2006-2007

NO	Jenis Usaha	Jumlah	
		2006	2007
1	Food and Beverage	19	19
2	Tobacco Manufacturers	4	4
3	Textile mill Products	9	10
4	Apparel and Other Textile Products	13	13
5	Lumber and Wood Products	5	4
6	Paper and Allied Products	5	6
7	Chemical and Allied Products	8	9
8	Adhesive	4	4
9	Plastics and Glass Products	12	14
10	Cement	3	3
11	Metal and Allied Products	11	12
12	Fabricated Metal Products	2	2
13	Stone, Clay, Glass and Concrete Products	4	5
15	Cable	6	6
16	Electronic and Office Equipment	3	5
17	Automotive and Allied Products	19	19
18	Photographic Equipment	3	3
19	Pharmaceuticals	9	9
20	Consumer Goods	3	4
	Total	142	151
	Akumulasi		293

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2006 dan 2007

Tabel 2
Proses Seleksi Sampel Dengan Kriteria

Total perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 dan 2007	1
	53
Perusahaan yang mengalami <i>delisting</i>	(
	13)
<i>Annual report</i> tidak tersedia secara lengkap selama tahun 2006-2007	(
	104)
Jumlah perusahaan sampel	3
	6
Tahun Pengamatan (tahun)	2
Jumlah sampel total selama periode penelitian	7
	2

Sumber : Data yang telah diolah

Tabel 3
Daftar Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan	No	Kode	Nama Perusahaan
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk	19	INTD	PT. Inter Delta Tbk
2	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	20	KLBF	PT. Kalbe Farma Tbk
3	ASGR	Astra Graphia Tbk	21	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk
4	ASII	Astra International Tbk	22	LTLS	PT. Lautan Luas Tbk
5	AUTO	Astra Otoparts Tbk	23	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
6	RMBA	Bentoel International Invest. Tbk	24	MERK	PT. Merck Tbk
7	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk	25	MTDL	PT. Metrodata Electronics Tbk
8	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	26	MDRN	PT. Modern International Tbk
9	FAST	Fast Food Indonesia Tbk	27	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
10	GJTL	Gajah Tunggal Tbk	28	MLPL	PT. Multipolar Tbk
11	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk	29	KONI	PT. Perdana Bangun Pusaka Tbk
12	GGRM	Gudang Garam Tbk	30	SMAR	PT. SMART Tbk
13	HEXA	Hexindo Adiperkasa Tbk	31	SOBI	PT. Sorini Agro Asia Corp. Tbk
14	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	32	SUGI	PT. Sugi Samapersada Tbk
15	BRAM	Indo Kordsa (Branta Mulia) Tbk	33	TIRA	PT. Tira Austenite Tbk
16	INTP	Indocement Tunggal Tbk	34	TURI	PT. Tunas Ridean Tbk
17	INAF	Indofarma Tbk	35	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
18	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	36	UNTR	PT. United Tractor Tbk

Sumber : ICMD berdasarkan hasil seleksi

Tabel 4
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPS	72	.12	.88	.4015	.18537
MAN	72	.00	31.40	1.1272	4.67145
LEV	72	-1.83	3.63	1.2931	1.06335
LN_SIZE	72	8.27	18.52	14.1408	2.09903
IND	72	.00	1.00	.6944	.46387
PM	72	-.03	1.48	.0868	.19754
COM	72	2.00	10.00	4.9167	2.16079
Valid N (listwise)	72				

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 5
Koefisien Determinasi (Adj R²)

Model	R	R Square	Adj. R Square	SEE	Durbin-Watson
1	.530(a)	.281	.215	.16427	2.225

a Predictors: (Constant), COM, PM, LEV, MAN, IND, LN_SIZE

b Dependent Variable: IPS

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 6
Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.686	6	.114	4.236	.001(a)
	Residual	1.754	65	.027		
	Total	2.440	71			

a Predictors: (Constant), COM, PM, LEV, MAN, IND, LN_SIZE

b Dependent Variable: IPS

Sumber: data sekunder diolah

Tabel 7
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.013	.150		.086	.931
	MAN (%)	.000	.004	.010	.087	.931
	LEV	.021	.018	.121	1.139	.259
	LN_SIZE	.016	.013	.182	1.211	.230
	IND	-.009	.047	-.022	-.188	.852
	PM (%)	-.125	.101	-.134	-1.245	.217
	COM	.031	.012	.356	2.536	.014

a Dependent Variable: IPS

Sumber: data sekunder diolah

BIODATA PENULIS

HARYANTO

Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Lulus S1 (1998) - Akuntansi - FE Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus S2 (2001) -
- Ilmu Akuntansi - Magister Sains Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

WIDY ERWANSYAH

Lulus S1 Jurusan Akuntansi FE Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2009.

Alamat:

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
Jl. Erlangga Tengah No. 17 Semarang
e-mail: haryantogege@yahoo.com HP: 0852 822 50777